

**PENGARUH UPAH MINIMUM KOTA DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENEKANAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2022**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

RENI ALSAKINAH

NPM: 1951010167



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENGARUH UPAH MINIMUM KOTA DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENEKANAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2022**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

RENI ALSAKINAH

NPM: 1951010167

Jurusan Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Nasruddin, M. Ag

Pembimbing II: Siska Yuli Anita, S. Pd., M.M

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi dan banyak faktor yang mempengaruhi seperti upah minimum kota dan jumlah penduduk. Permasalahan dalam penelitian ini: Apakah pengaruh upah minimum kota terhadap penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Apakah pengaruh jumlah penduduk terhadap angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Bagaimana pengaruh upah minimum kota dan jumlah penduduk terhadap penekanan angka kemiskinan di Bandar Lampung dan ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam Tahun 2012-2022.

Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan runtun waktu (*time series*). Analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan program Eviews versi 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah Minimum Kota berpengaruh negatif signifikan terhadap Penekanan Angka Kemiskinan di Kota Bandar Lampung dengan nilai probabilitas 0,0132 lebih kecil dari pada tingkat signifikan 5% atau $0,0132 < 0,05$. 2) Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,3806 lebih besar dari pada tingkat signifikan 5% atau $0,3806 > 0,05$. 3) Secara simultan Upah Minimum Kota dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung dengan nilai probabilitas (F-Statistik) lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau $0,002760 < 0,05$. Pada uji determinasi nilai R-Square bahwa sekitar 0.770799 atau 77,07% variabel Upah Minimum Kota (UMK) dan Jumlah Penduduk dapat menjelaskan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2022, sedangkan sisanya 22,93% dijelaskan oleh faktor-faktor lain, serta dari sisi ekonomi Islam terdapat dua prinsip yang membantu menciptakan kesejahteraan suatu daerah yaitu prinsip tauhid dan keadilan pada upah minimum kota, jumlah penduduk dan kemiskinan.

Kata Kunci: *Upah Minimum Kota (UMK), Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

Poverty in the city of Bandar Lampung is a problem that has not yet been resolved and many factors influence it, such as the city's minimum wage and population. Problems in this research: What is the effect of the city minimum wage on suppressing poverty rates in Bandar Lampung City, What is the effect of population on poverty rates in Bandar Lampung City, What is the effect of city minimum wages and population on suppressing poverty rates in Bandar Lampung and reviewed from perspective Islamic economics 2012-2022.

The data used comes from the Central Statistics Agency (BPS). The method used in this research is a quantitative method and the data used is secondary data obtained based on a time series. The data analysis used was multiple linear analysis with the Ordinary Least Square (OLS) method using the Eviews version 10 program.

The results of the research show that: 1) The City Minimum Wage has a significant negative effect on reducing poverty rates in Bandar Lampung City with a probability value of 0.0132 which is smaller than the 5% significance level or $0.0132 < 0.05$. 2) Population size has no influence on poverty with a probability value of 0.3806 which is greater than the 5% significance level or $0.3806 > 0.05$. 3) Simultaneously the City Minimum Wage and Population have a significant effect on suppressing the poverty rate in Bandar Lampung City with a probability value (F-Statistics) smaller than the 5% significance level or $0.002760 < 0.05$. In the determination test, the R-Square value is approx 0.770799 or 77.07% The City Minimum Wage (UMK) and Population Number variables can explain poverty in Bandar Lampung City 2012-2022, while the remaining 22.93% is explained by other factors, and from an Islamic economics perspective there are two principles that help create prosperity in an area, namely the principle monotheism and justice on city minimum wages, population and poverty.

Keywords: *City Minimum Wage (UMK), Population, Poverty, and Islamic Economy.*

SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Alsakinah
NPM : 1951010167
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Kota Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penekanan Angka Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2022”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023

Penulis



Reni Alsakinah
NPM. 1951010167



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

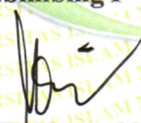
Judul Skripsi : Pengaruh Upah Minimum Kota Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penekanan Angka Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2022

**Nama : Reni Alsakinah
NPM : 1951010167
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

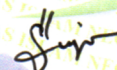
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

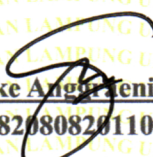

Dr. H. Nasruddin, M.Ag.
NIP. 195809241990031003

Pembimbing II


Siska Yuli Anita, M.M.
NIP. 199109012019032036

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Kota Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penekanan Angka Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2022” disusun oleh Reni Alsakinah, NPM 1951010167, Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Nasruddin, M.Ag**

(.....)


Sekretaris : **Erlin Kurniati, M.M**

(.....)

Penguji I : **Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak**

(.....)

Penguji II : **Siska Yuli Anita, M.M**

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suroanto, S.E., M.M., Akt., CA

NIR.197009262008011008

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.*

(Ali Imran: 139)¹



¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al Quran Kemenag* (Jakarta, 2021)(QS Ali Imran: 139).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirasi dan suri teladan terbaik untuk umat manusia.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan ungkapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, ayah Nano Surono dan ibu Almh. Purwati, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktuku menuntut ilmu.
2. Kakaku Dewi Fatimah dan adikku Ikhsan Alfarid yang tiada hentinya memberiku dukungan baik materi maupun spiritual sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik dalam menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik putra-putri Indonesia.
4. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke dalam memberikan ilmunya kepadaku dengan rasa tulus.
5. Untuk sahabat-sahabat dan teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih telah membantu selama proses penyelesaian tugas skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Reni Alsakinah dilahirkan di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan, pada tanggal 19 Februari 2001 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Nano Surono dan ibu Almh. Purwati.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 penulis memulai pendidikan di TK Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2007.
2. Pada tahun 2007 penulis menempuh pendidikan dasar di SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2013.
3. Pada tahun 2013 penulis menempuh pendidikan pertama di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis menempuh pendidikan menengah atas di MAN 1 Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2019.
5. Kemudian pada tahun 2019 meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Prodi Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023



Reni Alsakinah
1951010167

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Kota Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penekanan Angka Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2022” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan umat-umatnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Atas bantuan dan dukungan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Nasruddin, M. Ag selaku Pembimbing Akademik I yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Siska Yuli Anita, M.M selaku Pembimbing Akademik II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis serta selalu mendukung dan memotivasi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah berjasa bagi penulis dalam memberikan ilmu, mendidik dan membentuk karakter mahasiswanya menjadi lebih baik.
6. Seluruh staf karyawan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang turut berperan dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan yang selalu menjadi sumber kebahagiaan saya. Bapak saya Nano Suroño dan Ibu saya Almh. Purwati.

Semoga kebaikan semuanya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Ekonomi Islam bagi penulis dan pembaca, Aamiin.



Bandar Lampung, 1 Agustus 2023

Penulis


Reni Alsakinah

1951010167

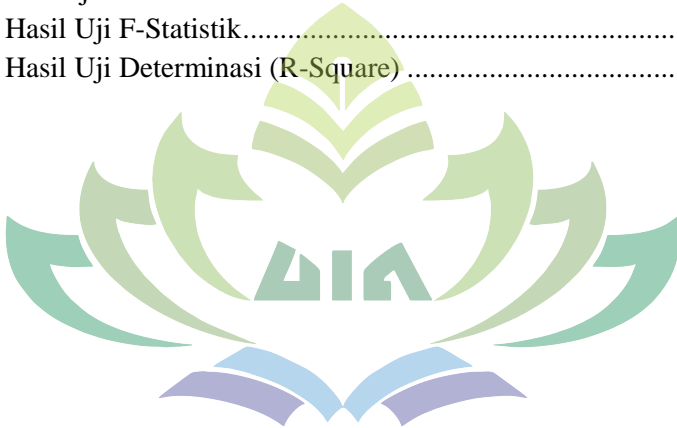
DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu | 11 |
| H. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS | |
| A. Landasan Teori..... | 23 |
| 1. Konsep Upah | 23 |
| a. Definisi Upah | 23 |
| b. Dasar Hukum Upah Minimum | 26 |
| c. Penetapan Upah..... | 27 |
| d. Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 28 |
| 2. Konsep Jumlah Penduduk | 31 |
| a. Definisi Jumlah Penduduk..... | 31 |
| b. Dampak Jumlah Penduduk | 33 |
| c. Pertumbuhan Penduduk..... | 34 |
| d. Jumlah Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 35 |
| 3. Konsep Kemiskinan | 36 |

| | | |
|---|---|-----------|
| a. | Definisi Kemiskinan | 36 |
| b. | Jenis-jenis Kemiskinan | 39 |
| c. | Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan | 41 |
| d. | Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam | 43 |
| 4. | Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan | 47 |
| a. | Prinsip Ketuhanan | 47 |
| b. | Prinsip Keadilan | 48 |
| B. | Kerangka Berpikir | 50 |
| C. | Pengajuan Hipotesis | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| A. | Waktu dan Tempat Penelitian..... | 53 |
| B. | Pendekatan dan Jenis Penelitian | 53 |
| C. | Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data | 54 |
| D. | Definisi Operasional Variabel | 55 |
| E. | Instrumen Penelitian..... | 57 |
| F. | Uji Prasarat Analisis..... | 57 |
| 1. | Uji Normalitas | 57 |
| 2. | Uji Multikolinearitas..... | 58 |
| 3. | Uji Heteroskedastisitas..... | 59 |
| 4. | Uji Autokorelasi..... | 59 |
| G. | Uji Hipotesis | 59 |
| 1. | Regresi Linier Berganda | 59 |
| 2. | Uji Parsial (t-Statistik)..... | 60 |
| 3. | Uji F-Statistik..... | 61 |
| 4. | Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) | 61 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | |
| A. | Deskripsi Data..... | 63 |
| B. | Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis | 70 |
| BAB V PENUTUP | | |
| A. | Simpulan | 91 |
| B. | Rekomendasi | 92 |
| DAFTAR RUJUKAN..... | | 93 |
| LAMPIRAN..... | | 99 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 3.1 Definisi Operasional Variabel | 56 |
| 4.1 Perkembangan Upah Minimum Kota Bandar Lampung | 67 |
| 4.2 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung | 68 |
| 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung | 69 |
| 4.4 Hasil Uji Normalitas | 70 |
| 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas | 71 |
| 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 72 |
| 4.7 Hasil Uji Autokorelasi..... | 73 |
| 4.8 Hasil Regresi Linier Berganda | 73 |
| 4.9 Hasil Uji t-Statistik..... | 75 |
| 4.10 Hasil Uji F-Statistik..... | 77 |
| 4.11 Hasil Uji Determinasi (R-Square) | 78 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2022 | 4 |
| 2.1 Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse | 39 |
| 2.2 Kerangka Berpikir | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| LAMPIRAN..... | 99 |
| Lampiran 1 Upah Minimum Kota, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Tahun 2012-2022 | 100 |
| Lampiran 2 Uji Normalitas..... | 100 |
| Lampiran 3 Uji Multikolinearitas | 101 |
| Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas..... | 101 |
| Lampiran 5 Uji Autokorelasi..... | 102 |
| Lampiran 6 Uji Regresi Linier Berganda | 103 |
| Lampiran 7 Uji t-Statistik..... | 103 |
| Lampiran 8 Uji F-Statistik..... | 104 |
| Lampiran 9 uji Determinasi (R-Square) | 104 |
| Lampiran 10 Surat Prariset..... | 106 |
| Lampiran 11 Surat Balasan Prariset | 107 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut dan terhindar dari kekeliruan pembaca dalam memahami judul maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan skripsi ini. Penegasan judul dibuat untuk menjelaskan alur serta maksud dari istilah yang terkait dalam penelitian ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Jumlah Penduduk Terhadap Angka Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.¹

2. Upah Minimum Kota

Upah Minimum Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kota.²

3. Jumlah Penduduk

Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith bahwa Jumlah Penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan.³

¹ Nuva Maresfin dan Eka Intan Kumala Putri, *Ekonomi Lingkungan (Tinjauan Teoritis Dan Kajian Praktis)* (Bogor: IPB Perss, 2015): 16.

² Dalinama Telaubanua, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 35.

³ Vikie A Asmuruf, Makdalena F Rumate and George M. V. Kawung, "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatannya Di Daerah (PAD) Di Kota Sorong," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 05 (2015) 732.

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah penerapan konsep-konsep Alquran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, ayat Alquran dan hadis menjadi inspirasi pertama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi diberbagai belahan dunia termasuk negara Indonesia. Kemiskinan sampai saat ini belum bisa diatasi dengan tuntas sehingga Indonesia sendiri sedang berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai upaya dengan cara membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang sesuai telah dilakukan untuk mengurangi masalah kemiskinan, seperti adanya pembangunan infrastruktur publik yang tengah digalakan pemerintah saat ini.

Terdapat fakta bahwa di Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen pada 2017, dan diharapkan menjadi 5,4 persen pada tahun 2018, belum terlihat signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Artinya banyak orang tidak miskin, tetapi hidupnya tidak jauh dari garis kemiskinan.⁶

Kemiskinan pada konsep kesejahteraan sosial dimaknai sebagai permasalahan sosial yang dialami seseorang atau

⁴ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan Dan Miskasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015): 1.

⁵ Bambang Sutrisno dan Jaharudin, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019): 3.

⁶ Ridwan Saifuddin et al., "Menggali Akar Kemiskinan: Melihat Dari Dekat Kemiskinan Di Provinsi Lampung," (Lampung: Balitbangda Provinsi Lampung, 2018): 1.

sekelompok masyarakat yang menyebabkan keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksud menurut UU No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷

Secara konseptual, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Penduduk miskin merupakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan target pembangunan dirumuskan dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat miskin agar mereka berada di atas garis kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan bisa diatasi dengan baik. Campur tangan pemerintah sudah sering dirasakan masyarakat. Saat ini pemerintah telah merancang kebijakan untuk pemerataan ekonomi, mulai dari reformasi agraria, redistribusi aset, serta kemudahan akses pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat bawah.

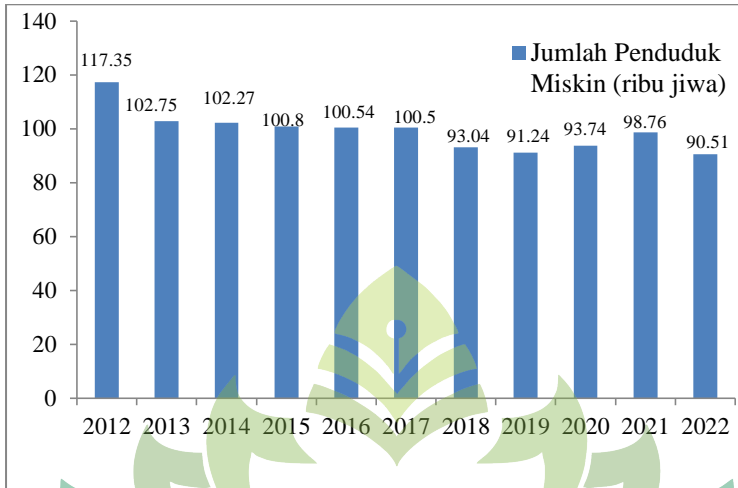
Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuatif, artinya penduduk miskin Indonesia pada setiap tahunnya berbeda karena ada peningkatan atau penurunan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan jumlah kemiskinan ini akan terus menjadi masalah bagi negara Indonesia yang termasuk negara berkembang.

Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung pada jumlah penduduk miskin yang mengalami fluktuatif. Selama periode 2012-2022 perkembangan jumlah penduduk miskin ini mengalami penurunan yang tidak begitu besar, tetapi tetap mempengaruhi kota Bandar Lampung. Jumlah penduduk miskin ini bisa mengalami fluktuatif

⁷ Istiana Hermawati, dkk, *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan* (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015): 10.

karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga setiap tahunnya jumlah penduduk miskin berbeda-beda.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pada tabel di atas bahwa jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung dari tahun 2012-2022 mengalami tren penurunan. Walaupun jumlah penduduk miskin selama 11 tahun ada peningkatan tetapi tidak tinggi dan lebih menunjukkan ke arah penurunan kemiskinan. Pada tahun 2012-2022 penurunan jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung sebesar 26,84 ribu jiwa. Dan terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin antara kota Bandar Lampung dan kota Metro. Jumlah penduduk miskin di kota Metro terbilang lebih kecil dari pada jumlah penduduk di kota Bandar Lampung. terlihat dari tahun 2012-2022 jumlah penduduk miskin kota Metro bahkan tidak mencapai 20 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di kota Metro tertinggi hanya mencapai 18,34 ribu jiwa pada tahun 2012. Dan tidak dapat dihindari bahwa perbedaan jumlah penduduk miskin antara kota Metro dan kota Bandar Lampung karena faktor kelahiran,

kematian, migrasi dan lahan atau wilayah yang cocok dijadikan tempat tinggal serta perekonomian yang baik sehingga dapat menarik penduduk dari berbagai penjuru dari luar kota. Kota Bandar Lampung sendiri terkenal sebagai pusatnya pertumbuhan ekonomi sehingga banyak peluang untuk penduduk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kehidupannya dan ini membuat kota Bandar Lampung menjadi daya tarik bagi penduduk dari luar kota untuk melakukan urbanisasi sehingga membuat jumlah penduduk kota Bandar Lampung jauh lebih banyak dari pada kota Metro.

Walaupun kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak dari kota Metro, dalam hal ini kota Bandar Lampung tetap mengalami tren penurunan yang mempengaruhinya sehingga terjadi tingkat penurunan jumlah penduduk miskin. Salah satunya adalah intervensi atau tindakan pemerintah melalui berbagai program yang dilakukan. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program bantuan pangan non tunai, program kelompok usaha bersama dan program keluarga harapan. Perubahan jumlah pada penduduk miskin ini bisa terjadi karena ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang pada setiap tahunnya berbeda. Upah minimum kota (UMK) dan jumlah penduduk ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah angka kemiskinan bahkan bisa menjadi penekanan pada angka kemiskinan.

Upah minimum kota (UMK) ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kemiskinan pada setiap tahunnya. Wilayah yang memiliki besaran upah minimum yang tinggi pada setiap tahunnya akan mengalami kenaikan, upah akan dinaikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peningkatan upah minimum kota (UMK) dapat berdampak pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Peningkatan upah minimum kota dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang dirasakan masyarakat

agar standar hidup dapat meningkat dan bisa mensejahterakan semua masyarakat.

Pemberian upah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghindari masyarakat dari permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian seperti kemiskinan. Masyarakat dengan upah minimum yang tinggi dalam suatu daerah memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang tinggi juga, dan begitupun sebaliknya jika upah minimum nya rendah pada suatu daerah maka masyarakat memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. Adanya pemberian upah minimum dapat membantu suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan dan meminimalisir kemiskinan.

Faktor kedua yang mempengaruhi jumlah kemiskinan adalah jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terstruktur akan mengakibatkan kepadatan penduduk sehingga pemenuhan kebutuhan pangan akan berkurang, fasilitas sosial dan kesehatan tidak mencukupi serta lapangan pekerjaan tidak mencukupi tenaga kerja yang akan membuat masyarakat mengalami kemiskinan. Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.⁸

Pertambahan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas masyarakat dan peningkatan sumber daya alam akan membuat kemiskinan semakin meningkat. Menurut Lincoln pertumbuhan penduduk dapat

⁸ Saharuddin Didu and Ferri Fauzi, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak," *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, no. 1 (2016): 102–17, <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>.

menimbulkan berbagai masalah dan hambatan terhadap upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat pertambahan jumlah tenaga kerja pesat, sedangkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki pekerjaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Kemiskinan salah satu masalah yang sangat serius dan tidak mudah diatasi. Kemiskinan dalam ekonomi Islam lebih kompleks dan mendekati realita. Kemiskinan dalam ekonomi Islam tidak selalu masalah duniawi tetapi juga masalah ukhrawi. Islam sebagai agama pertengahan juga memerangi kemiskinan. Dalam pandangan Islam kemiskinan merupakan masalah struktural, karena Allah menjamin *rizqi* kepada setiap makhluk ciptaannya. Dalam mencari *rizqi* yang telah Allah siapkan untuk umat Nya yang bekerja keras dan bukan yang berpangku tangan dan bermalas-malasan dalam mencari *rizqi*. Allah berjanji menanggung *rizqi* umat Nya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ (١٠٥)

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah kamu, Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."*(Q.S. At-Taubah/9:105)

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluknya untuk bekerja dan akan

⁹ S Y Anita, "Analisis Peran Gaya Kepemimpinan, Pelatihan Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022), <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/383%0Ahttps://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/383/299>.

menganugerahkan rezeki atas apa yang telah dikerjakan umat-Nya karena itu balasan yang akan didapat.

Kemiskinan adalah masalah yang wajib diperhatikan. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya akan membunuhnya”,¹⁰ karena kemiskinan merajalela akan mendatangkan banyak kerusakan dan kehancuran dimuka bumi, disamping itu mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat untuk saling membantu. Islam memberikan solusi agar manusia giat bekerja dan berusaha untuk kehidupannya sehingga tidak terjerumus dalam kemiskinan, serta menganjurkan kepada sesama makhluk ciptaan Allah untuk saling peduli dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

Tetapi pada kenyataannya Kota Bandar Lampung belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan seperti permasalahan abadi. Sehingga dapat dilihat bahwa program pemerintah hanya bisa mengatasi dampak kemiskinan dan belum bisa menyelesaikan akar permasalahannya.

Dapat disimpulkan bahwa penekanan kemiskinan bisa terjadi apabila upah minimum kota dan jumlah penduduk disesuaikan dengan keadaan suatu daerah. Seperti pada upah minimum kota, jika jumlah upah minimum kota yang diberikan menurun maka kemiskinan akan bertambah sebab penetapan tingkat upah minimum diterapkan untuk mensejahterakan pekerja. Dan jumlah penduduk juga ikut berpengaruh, jika jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang pesat akan membuat angka kemiskinan bertambah. Sehingga peningkatan kemiskinan bisa terjadi, oleh karena itu perlu adanya penekanan kemiskinan. Penekanan kemiskinan bisa terjadi jika kebijakan yang diambil tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil

¹⁰ Husna Ni`matul Ulya, “Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional,” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 129, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>.

judul: **“PENGARUH UPAH MINIMUM KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENEKANAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2022”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penduduk di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya bertambah sehingga secara otomatis mengalami kepadatan penduduk, namun adanya pemadatan penduduk ini yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan tidak tercukupi sehingga jumlah kemiskinan bisa bertambah. Begitupun upah minimum kabupaten/kota di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya bertambah sehingga berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan karena adanya peningkatan upah minimum regional membuat standar hidup pekerja meningkat.

2. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dan mengingat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Yaitu hanya berkaitan dengan upah minimum kabupaten/kota dan jumlah penduduk terhadap angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2022 menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis telah merangkum permasalahan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh upah minimum kota terhadap penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2012-2022?
2. Apakah pengaruh jumlah penduduk terhadap angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2012-2022?
3. Apakah pengaruh upah minimum kota dan jumlah penduduk terhadap penekanan angka kemiskinan di Bandar Lampung tahun 2012-2022?
4. Bagaimana perspektif ekonomi Islam pada upah minimum kota, jumlah penduduk dan kemiskinan di Kota Bandar Lampung dan Tahun 2012-2022?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisa dan membuktikan upah minimum kota di Bandar Lampung berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan.
2. Untuk menganalisa dan membuktikan jumlah penduduk di Bandar Lampung berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan.
3. Untuk menganalisa dan membuktikan upah minimum kota dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan di Bandar Lampung.
4. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam pada upah minimum kota, jumlah penduduk dan kemiskinan.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat guna meningkatkan wawasan terhadap kasus-kasus yang nyata atas bentuk pengaplikasian penelitian terhadap teori yang telah didapat selama masa kuliah. Serta penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti

tentang Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penekanan Angka Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian atau melaksanakan pembahasan ini lebih dalam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Untuk mendukung permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari dari berbagai *literature* dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Wita Utami, Tianovida Siregar/ 2021 | Pengaruh UMR Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016 | Pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas (x) yaitu upah minimum regional dan penduduk jiwa berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu kemiskinan. |
| 2. | Rizki Maulana Prasetyo/ 2022 | Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat | Dalam penelitian ini pada variabel tingkat pengangguran dan upah minimum regional berpengaruh terhadap tingkat |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| | | Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 | kemiskinan di Kota Tasikmalaya sebanyak 92% dan 8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel. |
| 3. | Marito Ritonga, Tri Wulantika/ 2020 | Pengaruh PDRBD dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Sumatera Utara (2010-2018) | Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2010-2018. Sedangkan pada variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara tahun 2010-2018 |
| 4. | Yulia Adela Sari/ 2021 | Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah | Pada penelitian ini upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Karena adanya ketentuan nilai upah minimum. Pada tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh positif |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| | | | <p>dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan pada jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jadi secara bersama-sama upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.</p> |
| 5. | Syafri, Putri Aulia Febrianti/ 2021 | <p>Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kab/Kota Provinsi Banten</p> | <p>Penelitian ini menunjukan bahwa pada pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pada tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Tetapi pada upah minimum regional berpengaruh</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. |
| 6. | Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu, Steva Y.L. Tumangkeng / 2019 | Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum mampu memberikan pengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sementara untuk variabel Investasi pemerintah masih belum memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi secara bersama-sama variabel upah minimum dan investasi ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap upah Provinsi Sulawesi Utara. |
| 7. | Elda Wahyu Azizah, Sudarti, Hendra/ 2018 | Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi | Penelitian ini menunjukkan daam variabel pendidikan dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | Jawa Timur | signifikan terhadap kemiskinan, tetapi pada variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. |
| 8. | Lulut Lavenia, Syafri Mandai, Muhammad Yudhi Lutfi/2023 | Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021 | Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum dan tingkat melek huruf tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan produk regional bruto, pengangguran dan jumlah penduduk semuanya berpengaruh positif terhadap kemiskinan. |
| 9. | Aulia Nur Azizah, Binti Nur Aisyah/2022 | Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Bruto Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur | Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. |
| 10. | I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiadnyana, Sis Hadiyati /2023 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali | Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan pengangguran bahwa tidak dapat mempengaruhi kemiskinan secara signifikan tetapi pada variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan. |

Sumber Data: Diolah Oleh Penulis Tahun 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian diatas penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Upah Minimum Kota dan Jumlah Penduduk Terhadap Penekanan Angka Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2022”. Berikut persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Wita Utami dan Trianovida Siregar (2021), dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh UMR Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016".¹¹
 - a. **Persamaan:** Menggunakan variabel X yang sama yaitu upah minimum dan variabel Y yaitu kemiskinan. Dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif.
 - b. **Perbedaan:** Pada penelitian terdahulu hanya terdapat variabel X1 yaitu upah minimum dan tidak ada variabel X2 yaitu jumlah penduduk.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Rizki Maulana Prasetyo (2022), dalam jurnal "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021".¹²
 - a. **Persamaan:** Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS.
 - b. **Perbedaan:** Variabel X pada penelitian Rizky Maulana Prasetyo yaitu Pengangguran dan Upah Minimum Regional sedangkan penelitian ini pada variabel X berupa upah minimum dan jumlah penduduk.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Marito Ritonga dan Tri Wulantika (2020), dalam jurnal "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batu Sumatera Utara Tahun 2010-2018".¹³

¹¹ Tianovida Siregar Wita Utami, "Pengaruh Umr Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016," *Jurnal Pionir LPPM* 7, no. 1 (2021): 21.

¹² Maulana Prasetyo Rizki, "Tingkat Pengangguran Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021" 1, no. 55 (2015): 1–6.

¹³ Marito Ritonga and Tri Wulantika, "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)," *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020): 95–102, <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3135>.

- a. **Persamaan:** Penggunaan metode sama-sama kuantitatif dan terdapat persamaan pada variabel X yaitu jumlah penduduk dan variabel Y yaitu Kemiskinan.
 - b. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu terdapat salah satu variabel X yang berbeda yaitu PDRBD.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Yulia Adela Sari (2021), dalam jurnal “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa”.¹⁴
- a. **Persamaan:** Pada penelitian ini memiliki persamaan variabel X yaitu upah minimum dan jumlah penduduk serta variabel Y yaitu kemiskinan.
 - b. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) dengan alat bantu statistika berupa SPSS 25.0 for windows.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Syafri dan Putri Aulia Febrianti (2021), dalam jurnal “Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kab/Kota Provinsi Banten”.¹⁵
- a. **Persamaan:** Pada variabel X yang digunakan yaitu Jumlah Penduduk dan Upah Minimum serta variabel Y yang digunakan yaitu Kemiskinan. Metode yang digunakan sama-sama metode kuantitatif
 - b. **Perbedaan:** Penelitian Syafri dan Putri Aulia melakukan penelitian dengan menggunakan data

¹⁴ Yulia Adella Sari, “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah,” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2021): 121–30, <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>.

¹⁵ Syafri and Putri Aulia Febrianti, “Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kab/Kota Privinsi Banten,” *Metrik Serial Humaniora Dan Sains* 2, no. 1 (2021): 28–34.

panel sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu, dan Steva Y.L. Tumangkeng (2019), dalam jurnal “Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara”.¹⁶
 - a. **Persamaan:** Pada penelitian ini terdapat persamaan yaitu metode yang digunakan adalah analisis linear berganda dan menggunakan data time series.
 - b. **Perbedaan:** Penelitian yang dilakukan Rizky Yulita Sutikno dkk salah variabel X adalah Investasi sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan upah minimum dan jumlah penduduk.
7. Penelitian ini dilakukan oleh Elda Wahyu Azizah, Sudarti, dan Hendra (2018), dalam jurnal “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur”.¹⁷
 - a. **Persamaan:** Pada penelitian ini terdapat persamaan variabel X yaitu Jumlah Penduduk dan variabel Y Kemiskinan dan data yang digunakan yaitu data Time Series.
 - b. **Perbedaan:** Penelitian ini menggunakan data panel berupa Cross Section.
8. Penelitian ini dilakukan oleh Lulut Lavenia, Syafri Mandai dan Muhammad Yudhi Lutfi (2023), dalam jurnal “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka

¹⁶ Rizky Yulita Sutikno Debby Ch. Rotinsulu Steeva Y.L. Tumangkeng, “Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 88–98.

¹⁷ Elda Wahyu Azizah, Sudarti Sudarti, and Hendra Kusuma, “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2018): 167–80.

Melek Huruf terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021”¹⁸

- a. **Persamaan:** Pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan perangkat lunak berupa eviews dan menggunakan data sekunder.
 - b. **Perbedaan:** Penelitian yang dilakukan Lulut Lavenia dkk terdapat di Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung.
9. Penelitian ini dilakukan oleh Aulia Nur Azizah dan Binti Nur Aisyah (2022), dalam jurnal “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Bruto Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur”¹⁹
- a. **Persamaan:** Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nur Azizah dan Binti Nur Aisyah menggunakan variabel X yang sama yaitu Jumlah Penduduk dan variabel Y yaitu Kemiskinan dan pengolahan data yang digunakan menggunakan alat bantu eviews.
 - b. **Perbedaan:** Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nur Azizah dan Binti Nur Aisyah variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Bruto Dan Pengangguran serta menggunakan data panel dengan model *Fixed Effect Model (FEM)*.
10. Penelitian ini dilakukan oleh I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiadnyana dan Sis Hadiyati (2023), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”²⁰

¹⁸ Lulut Lavenia et al., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum , Pengangguran , Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 319–28.

¹⁹ Aulia Nur Azizah and Binti Nur Asiyah, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2697–2718, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>.

²⁰ I Gusti Agung, Ngurah Bagus, and Sis Hadiyati, “Pengaruh

- a. **Persamaan:** Pada penelitian yang dilakukan I Gusti dan Sis Hadiyati terdapat kesamaan pada jenis penelitian yaitu kuantitatif dan menggunakan data tahunan (time series).
- b. **Perbedaan:** Penelitian yang dilakukan I Gusti dan Sis Hadiyati menggunakan variabel X pendidikan, pengangguran dan pengaruh pertumbuhan sedangkan pada penelitian ini paada variabel X menggunakan Jumlah Penduduk dan Upah Minimum saja.

Dalam tabel diatas, terdapat berbagai penelitian yang membahas mengenai kemiskinan. Dengan dibuatnya tabel penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian terdahulu serta sebagai penguat alasan penelitian ini dilakukan.

Pada penelitian ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (upah minimum kota dan jumlah penduduk) terhadap variabel dependen (angka kemiskinan). Selain itu penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam. Dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan alat bantu *Eviews-10*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasana yang ada dalam skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu adanya sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman abstrak, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman

daftar riwayat hidup, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama skripsi terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Identifikasi dan Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
- H. Sistematika Penulisan

Bab II: Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

- A. Teori Yang Digunakan
- B. Pengajuan Hipotesis

Bab III: Metode Penelitian

- A. Waktu dan Tempat Penelitian
- B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpula Data
- D. Definisi Operasional Variabel
- E. Instrumen Penelitian
- F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
- G. Uji Prasarat Analisis
- H. Uji Hipotesis

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Deskripsi Data
- B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis

Bab V: Penutup

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

Daftar Rujukan

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Upah

a. Definisi Upah

Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja. Upah memberikan peranan penting dalam suatu hubungan kerja, bahkan upah menjadi tujuan utama seorang pekerja.

Upah minimum merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, mendefinisikan upah minimum sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.”²¹ Artinya upah tersebut sebagai imbalan dari pengusaha untuk pekerja dan upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan dengan persetujuan atau peraturan undang-undang atas dasar perjanjian kerja atas pengusaha dan pekerja.

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan kerja atau usaha.²² Upah Minimum Regional ada dua yaitu upah minimum regional tingkat I yang disebut UMR Provinsi karena upah minimumnya berlaku di satu Provinsi dan upah minimum regional tingkat II disebut UMR Kabupaten/Kota karena upah minimum

²¹ Izzaty and Rafika Sari, “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2013): 131–45.

²² Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 608.

ini berlaku di daerah kabupaten/kota menurut pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8,11, 20 dan 21 PER01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota (UM kab/kota).²³

Menurut Sumarsono (2009:151), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu; menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Selanjutnya Sumarsono (2009:201) menyatakan bahwa beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja.²⁴ Tetapi penerapan upah minimum tidak selalu menjadi faktor pengurangan kesempatan kerja, upah minimum ini bahkan menjadi pendorong proses pemulihan ekonomi. Penerapan upah minimum yang tepat dan sesuai keadaan suatu daerah maka akan mengurangi kemiskinan. Jadi upah minimum

²³ Zulkifli, "Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan," *Journal Ecces* 3, no. 2 (2016): 90–106, <http://103.55.216.56/index.php/ecc/article/view/2900>.

²⁴ Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja* (Malang: Ahlimedia Press, 2022): 20.

merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Dan terdapat beberapa teori upah yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:

1) Teori Upah Substansi (tahun 1772-1823)²⁵

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut teori Ricardo, jika upah cukup tinggi maka para pekerja akan cenderung melakukan pesta perkawinan. Akibatnya tingkat kelahiran semakin tinggi dan kemudian tingkat pertumbuhan angkatan kerja semakin meningkat untuk mencari lapangan pekerjaan dan bersedia walaupun upahnya ditekan serendah mungkin oleh pengusaha sampai tingkat substansi. Dan dapat disimpulkan bahwa upah akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah substansi.

2) Teori Dana Tetap untuk Upah Seseorang (tahun 1803-1873)²⁶

Seorang ahli ekonomi Inggris bernama John Stuard Mill yang berpendapat bahwa pada setiap negara terdapat dana yang terbatas untuk upah. Dana untuk upah merupakan bagian dari dana masyarakat yang dihimpun dari tabungan. Menurut teori ini tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.

²⁵ Ibid., : 17.

²⁶ Agus Yulistiyono and Dkk, *Ekonomi Lanjutan* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022): 36.

b. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum upah minimum dapat dilihat dalam Ketentuan Pasal 88 ayat (4) No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.²⁷ Dalam hal ini upah minimum tidak berfungsi sebagai titik tolak, tetapi sekadar sebagai penetapan besarnya upah. Dalam peningkatan upah para pekerja/buruh sangat bergantung pada penyesuaian upah minimum yang ditetapkan setiap tahun.

Berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi, terdapat dasar hukum mengenai penetapan Upah Minimum yaitu pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah minimum, mengenai upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan Gubernur sebagai jaringan pengaman. Penetapan upah sebagai jaringan pengaman dimaksudkan agar pekerja mendapatkan upah sesuai produktivitas sehingga tidak ada dinakima tentang pengupahan.

Dari berbagai hukum yang membahas tentang dasar hukum upah minimum, dua dasar hukum yang telah dipaparkan diatas seharusnya menjadi dasar hukum yang sesuai dengan keadaan suatu daerah. Karena penetapan hukum tentang upah minimum yang tidak sesuai bisa menyebabkan permasalahan terutama pada kemiskinan sebab upah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

²⁷ Dian Ferricha, *Hukum Ketenagakerjaan Di Era Digitalitasasi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021): 202.

c. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah sangat berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi, maka dapat diberikan alasan atau pembenaran penetapan dalam upah. Faktor-faktor yang menentukan antara lain:

- 1) Peningkatan kebutuhan hidup.
- 2) Peningkatan produktifitas kerja.
- 3) Kemajuan (atau ketidak mampuan) majikan untuk membayar.
- 4) Pembayaran upah pada industri yang satu dengan yang lain pada suatu wilayah.
- 5) Dampak yang timbul dari tinggi atau rendahnya upah dalam nilai tawar buruh (power employment).²⁸

Penetapan upah minimum harus memperhatikan Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).²⁹ KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja untuk hidup layak dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan bahwa Gubernur lebih mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayahnya. Gubernur menetapkan upah minimum berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020): 53.

²⁹ Shinta Puspasari, Mochamad Ridwan, and Satya Nurhakim, "Bargaining Dengan Mekanisme Penetapan Upah Minimum," n.d., 289–309.

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{inflasi} + \% \Delta PBD_t)\}$$

Keterangan:

- U_mn = Upah Minimum yang akan ditetapkan
 U_mt = Upah Minimum Tahun Berjalan
 Inflasi = Inflasi yang dihitung dari bulan yang sama pada tahun lalu sampai tahun berjalan
 Delta = Pertumbuhan Produk Bruto (dihitung dari kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan)

d. Upah Minimum Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1) Definisi Upah

Dalam Islam upah disebut *ujrah* yang dihasilkan dari akad *Ijarah*. Dari segi Bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) "al-ujrah" atau "al-ajru" yang menurut bahasa berarti al-'iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah mengupah. Upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh tenaga kerja.

Upah (*ujrah*) terbagi menjadi dua³⁰, yaitu :

- a. *Ujrah al-misli* adalah upah yang distandarkan sengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
- b. *Ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan.

³⁰ Budi Solihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)," *Al-Mujaddid Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2018): 19–31.

Menurut Mustofa (2010) sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi, disamping itu masih banyak lagi sumber hukum yang digunakan.³¹ Al-Quran sebagai sumber hukum dalam upah salah satunya diambil dari Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۱۹)

Artinya: “Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.” (Q.S. Al-Ahqaf :19)

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas, menunjukkan bahwa upah telah disyariatkan oleh Allah dan harus dibayar sebagai kompensasi atau balasan dan hak pekerja atau buruh untuk membela nilai-nilai keadilan dan kelayakan sesuatu dengan membantu atau jasa yang dilakukan oleh pekerja. Tapi Islam menolak gagasan bahwa bekerja bukan hanya tentang menghasilkan uang tetapi imbalan untuk mendapatkan pahala.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah sesuatu yang baik berupa uang atau sesuatu yang pantas yang dapat diterima dan digunakan sebagai imbalan balas jasa dan sebagai pengganti atas pengorbanan jasa yang telah diberikan oleh pekerja dalam memenuhi permintaan majikan.

³¹ Nono Hartono, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 233–62, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2835>.

1) **Pandangan Islam tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)**

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan kesepakatan antara majikan dan pekerja. Islam mengatur bagaimana menetapkan tingkat upah minimum yang sesuai bagi pekerja dengan prinsip kelayakan dari upah.

Ibnu Khaldun membahas masalah upah dalam perekonomian. Ia merujuk istilah buruh dengan terminologi shina'ah (bekerja di pabrik). Dalam terminologi ekonomi modern, Shina'ah dikenal dengan istilah lapangan kerja. Menurut Ibnu Khaldun, buruh adalah sumber nilai.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa buruh berada pada posisi yang sangat rentan terhadap majikannya, oleh karena itu Islam sangat berhati-hati untuk melindungi hak-hak mereka agar tidak dilanggar oleh majikan.³² Atas dasar ini, untuk melindungi pekerja, maka tingkat upah minimum harus berada pada tingkat minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak melebihi tingkat maksimum yang ditetapkan untuk melindungi pengusaha. Sehingga keadilan dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat tercapai. Tentu saja, ketika kedua belah pihak memenuhi prinsip keadilan dan bertanggung jawab atas tugasnya, ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam Islam, penting untuk bersikap adil dalam segala hal, termasuk pengelolaan upah pekerja. Secara khusus, semua umat Islam

³² Solihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR): 29."

harus memahami bahwa setiap Muslim adalah saudara laki-laki dan perempuan, sehingga umat Islam yang lain tidak dapat benar-benar saling menindas dan harus saling melindungi.

Dalam peraturan negara tentang penetapan UMK, sebenarnya pemerintah menetapkan bahwa tanggung jawab pemerintah atau negara tidak dialihkan kepada perusahaan, tetapi merupakan pembagian kerja yang keduanya harus bekerja sama. Maka pekerja/pegawai sebagai individu memiliki tanggung jawab pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya.

2. Konsep Jumlah Penduduk

a. Definisi Jumlah Penduduk

Penduduk adalah kumpulan orang yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Menurut BPS penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Artinya siapapun penduduk baik warga negara asing atau berniat sebagai warga negara Indonesia yang bersedia taat pada hukum dan ketentuan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai penduduk.

Jumlah penduduk disuatu wilayah tidaklah tetap, tetapi akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) seiring berjalannya waktu. Jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh, tiga hal yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematian. Serta migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu

wilayah ke wilayah lain yang menyebabkan suatu daerah menjadi padat penduduk.

Menurut Siregar dan Wahuniarti berpendapat bahwa apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.³³ Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja tetapi tidak diseimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Karena pengangguran yang meningkat ini membuat kemiskinan bisa terjadi.

Jumlah penduduk memberikan kontribusi besar terhadap tingkat kemiskinan, karena semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu negara terutama di negara berkembang maka akan bertambah. Masalah jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Dalam definisi jumlah penduduk terdapat teori pada kependudukan yaitu:

1) Teori Thomas Robert Malthus³⁴

Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, Thomas Robert Malthus dalam teori penduduk mengajukan tiga hal penting yaitu:

- a. Penduduk dibatasi sumber-sumber subsistensi pangan.
- b. Jumlah penduduk akan meningkat apabila sumber-sumber subsistensi meningkat, kecuali ada faktor-faktor yang menghambat.

³³ Rapika Kesatriani Damanik and Selna Aprilia Sidauruk, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 3 (2020): 358, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>.

³⁴ Abdul Rahman, *Ekonomi Demografi Dan Kependudukan* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023): 40.

- c. Faktor penghambat tersebut yang menekan perkembangan penduduk serta menekan dampaknya pada tingkat subsistensi dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan dan kesengsaraan.

Dalam teorinya Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat disebabkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan kehamilan dan kelahiran tidak bisa dihentikan. Sementara disaat bersamaan, jumlah penduduk yang meningkat membutuhkan pasokan pangan yang cukup.

b. Dampak Jumlah Penduduk

Permasalahan kependudukan yang berhubungan dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat dihindarkan. Benturan yang terjadi dari berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali membuat suatu daerah dalam aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga karena banyaknya beban tanggungan sehingga sulit untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan.

Selain itu, terdapat dampak yang muncul terkait jumlah penduduk yang besar yaitu lapangan pekerjaan. Kebutuhan bahan pokok menuntut seseorang harus bekerja dan mencari nafkah. Tetapi akibat jumlah penduduk yang besar membuat ketersediaan lapangan pekerjaan sangat minim. Karena para pekerja cenderung lebih memilih bekerja untuk orang lain dibandingkan menciptakan lapangan pekerjaan.

Jumlah penduduk yang besar memiliki peran dalam berbagai masalah lingkungan. Jumlah penduduk yang besar sangat membutuhkan lahan yang luas tetapi lahan suatu daerah tidaklah bertambah karena semakin

banyaknya jumlah penduduk maka lahan tersebut semakin terbatas dan akan mengakibatkan kepadatan penduduk.

Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak yang ditimbulkan karena jumlah penduduk yang besar sehingga diperlukan adanya batasan-batasan agar kemiskinan disuatu daerah semakin banyak. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang guna dalam menentukan kebijakan terkait dengan besaran jumlah penduduk terutama di Indonesia.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah kenaikan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya pertambahan penduduk dalam setiap 1000 orang per tahun. Laju pertumbuhan ditentukan oleh laju kelahiran dengan laju kematian serta selisih antara imigrasi dan emigrasi. Rumus yang di gunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah:

$$P_t = P_O + (L - M) + (I - O)$$

Keterangan:

- PT = Pertumbuhan Penduduk Total akhir tahun
- PO = Jumlah Penduduk awal tahun
- L = Jumlah Kelahiran dalam 1 tahun
- M = Jumlah Kematian dalam 1 tahun
- I = Jumlah Penduduk Pendetang dalam 1 tahun
- O = Jumlah Penduduk Keluar dalam 1 tahun

Pertumbuhan penduduk berlangsung sangat cepat, sehingga terjadi ledakan penduduk. Ledakan penduduk ini membuat adanya kekhawatiran karena jumlah penduduk bertambah akibat adanya laju pertumbuhan yang tinggi.

Pertumbuhan penduduk sering disebut sebagai eksponensial yang artinya berlipat karena penduduk berdasarkan presentase konstan.

d. Jumlah Penduduk Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam menganjurkan umatnya memiliki keturunan yang berkualitas dibandingkan memiliki banyak keturunan tetapi tidak berkualitas. Nabi bangga memiliki banyak umat, tetapi Nabi akan sangat bangga jika mereka memiliki kualitas yang mampu mengembangkan agama Islam. Jumlah yang banyak akan tetapi tidak mempunyai kontribusi terhadap pembangunan negara hanya akan menjadi beban suatu negara.

Manusia diciptakan Allah dengan memberikan akal untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan potensi diri. Dan Allah menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia dan makhluk hidup lain. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dijaga dengan baik. konsep yang ingin dikedepankan adalah *zurriyat* (mempersiapkan generasi buat masa depan) di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّخِذُوا اللَّهَ وَلِيًّا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

(Q.S. An-Nisa/4:9)

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa Allah melarang kita sebagai umatnya meninggalkan

keturunan yang lemah baik dari sisi aqidah, ilmu, ekonomi, sosial-budaya dan teknologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan diri bahkan tidak dapat memanfaatkan dan mengelola alam. Ayat di atas mengandung pesan penting yaitu generasi yang berkualitas dapat meningkatkan standar hidup diatas garis kemiskinan sehingga dengan jumlah penduduk yang memiliki kualitas baik tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Islam sesungguhnya mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas sehingga dapat tercapainya kesejahteraan untuk para penduduknya.

3. Konsep Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan hidup rata-rata disuatu daerah. Kondisi tidak dapat memenuhi standar kebutuhan ditandai dengan pendapatan yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Pendapatan yang rendah juga berdampak pada pemenuhan standar hidup rata-rata seperti pendidikan dan standar kesehatan masyarakat pada umumnya.

Marianti dan Munawar (2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan seseorang dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati.

Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan semata, menurut Tjokrowinoto (1995)

kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses terhadap peluang pekerjaan, menghabiskan sebagian besar hanya untuk kebutuhan konsumsi, bahkan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk berada diatas garis kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan hidupnya. Kebutuhan pokok bagi setiap orang sangat diperlukan untuk bisa hidup secara manusiawi.

Menurut Arsyad secara garis besar, kemiskinan terdapat dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin harta (aset) organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjukkan antara lemahnyanya daya beli dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut terminifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada penjelasan diatas yang telah dipaparkan kemiskinan memiliki beberapa teori diantaranya yaitu:

1) Teori Neo-Liberal³⁵

Menurut para pakar yang menganalisa kemiskinan seperti Shannon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave mengatakan bahwa

³⁵ Deris Desmawan, *Faktor Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Panel* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021):10.

kemiskinan merupakan persoalan individu yang bersangkutan. Tingkat kemiskinan akan berkurang apabila pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Dan strategi penanggulangan kemiskinan bersifat “residual” artinya hanya sementara, yang melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai program kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, seperti penerpan Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) di Indonesia adalah contoh nyata teori ini.

2) Teori Demokrasi Sosial³⁶

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan persoalan yang bersifat struktural. Pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan dan ketidakmerataan yang diakibatkan karena terhambatnya akses pelayanan masyarakat. Sehingga teori demokrasi sosial ini menekankan bahwa pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya.

3) Teori Lingkaran Kemiskinan³⁷

Kemiskinan merupakan sebuah hubungan sebab akibat dan terdapat kausalitas yang membentuk sebuah lingkaran kemiskinan. Lingkaran paradigma kemiskinan ini menggambarkan bahwa kemiskinan disebabkan karena kemiskinan itu sendiri. Lingkaran Setan

³⁶ Ibid, Desmawan.,: 11.

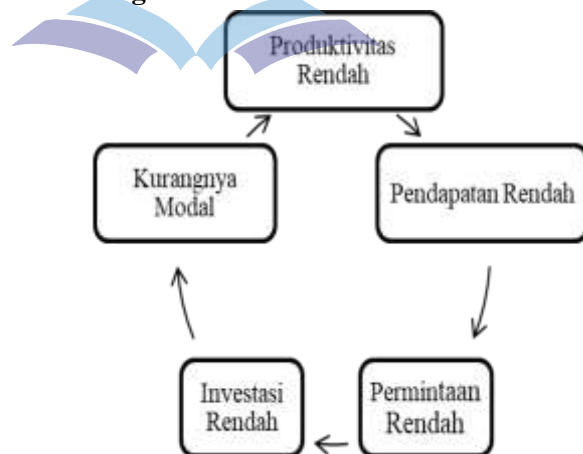
³⁷ Ibid, Desmawan.:20.

Kemiskinan menurut Nurkse (Jhingan, 2010) adalah deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu dengan yang lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara-negara berkembang sangat rendah, dan itu berarti menempatkan suatu negara miskin berada dalam keadaan melarat.

Teori lingkaran kemiskinan Nurkse menyatakan bahwa yang terpenting dalam lingkaran kemiskinan yaitu hambatan yang timbul karena disebabkan oleh keadaan dalam pembentukan modal yang tinggi. Menurut Nurkse (Damanhuri, 2010) ada dua jenis lingkaran yang menghambat perkembangan suatu negara untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dilihat berdasarkan sisi penawaran modal dan sisi permintaan modal.³⁸

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse



³⁸ Ibid, Desmawan: 20.

b. Jenis-jenis Kemiskinan**1) Kemiskinan Alamiah**

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum. Dan terdapat faktor lain yang ikut menjadi penyebab kemiskinan alamiah yaitu karena cacat, sakit, usia lanjut atau terkena bencana alam. Kondisi ini terjadi pada daerah yang belum terjangkau pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal atau daerah terisolasi dan akses menuju daerah tersebut sulit dijangkau, sehingga kemiskinan alamiah ini menjadi kondisi kemiskinan terparah.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan karena masyarakat sulit untuk memanfaatkan sumber daya alam, sarana umum dan fasilitas ekonomi secara merata. Dalam hal ini kemiskinan buatan tidak berkaitan dengan sumber daya alam yang tersedia karena kemiskinan buatan lebih erat hubungannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan.

3) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan dimana orang-orang miskin memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan yang sudah ditentukan, atau jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan untuk kualitas hidup yang lebih meningkat. Garis kemiskinan merupakan standar kebutuhan hidup dengan

mengaitkan pengeluaran atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok.

4) **Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan standar kesejahteraan hal ini disebabkan karena dalam lapisan seluruh masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan pembangunan yang ada. Seperti program pembangunan yang belum bisa menjangkau suatu daerah sehingga terjadi ketimpangan yang membuat daerah tersebut menjadi daerah tertinggal.

5) **Kemiskinan Kultural**

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak ingin mengubah kehidupannya yang disebabkan karena gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kebiasaan hidup dalam kemiskinan kultural ini seperti sikap malas, kurang kreatif, tidak pernah berhemat, dan relatif baergantung kepada orang lain.

6) **Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia yaitu unsur diskriminatif seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, adanya distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kemiskinan struktural ini terjadi karena rendahnya dalam

mendapatkan sumber daya yang disebabkan kurang didukung dan hal ini umumnya terjadi di tatanan sosial budaya maupun sosial politik.³⁹

c. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Pertama, kemiskinan selalu dihubungkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, karena mahalnya pendidikan. Walaupun pemerintah membebaskan uang bayaran SD dan SLTP tetapi biaya komponen pendidikan lain yang perlu dikeluarkan masih terbilang tinggi.

Kedua, kemiskinan selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Sektor pertanian di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Dengan demikian tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan diantara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

Ketiga, kemiskinan selalu dihubungkan dengan gender. di Indonesia perbedaan gender sangat terasa dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dari pada penduduk laki-

³⁹ Murbanto Sinaga, *Mengungkap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kepulauan Nias* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2019): 27.

laki karena perempuan dianggap tidak mampu bekerja dengan baik dibanding laki-laki.

Keempat, kemiskinan selalu dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya pelayanan infrastruktur tidak merata.

Kelima, lokasi geografis berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia.

d. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1) Definisi Kemiskinan dalam Islam

Islam selalu hadir dalam segala persoalan kehidupan. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, Islam memandang serius terhadap konsep dan eksekusi. Kata yang familiar dalam menggambarkan kemiskinan adalah kata ‘fakir’ dan kata ‘miskin’. Menurut Saad Ibrahim, kata ‘fakir’ atau kefakiran merupakan kondisi kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi.⁴⁰

Miskin berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki adalah tidak mempunyai apa pun. Sedangkan fakir adalah mereka yang memiliki harta akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapat lain tentang kemiskinan dikemukakan oleh Taqiyuddin an-

⁴⁰ Ismail, “Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 110–134.

Nabhani. Menurutnya, kemiskinan bergantung pada pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.⁴¹

Dari beberapa definisi diatas, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara psikologis, sosial dan rohani. Dalam menyikapi ini, negara dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu dan menjamin kehidupan yang layak.

a. Problem Dasar

Islam sangat mengalami kesulitan dalam mencapai kesejahteraan hidup yang dipengaruhi oleh cara pandang penanganan kemiskinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengutamakan kebutuhan materi dalam kemiskinan bukanlah solusi bagi Islam karena penanganannya hanya tertuju pada standar kebutuhan hidup di bawah rata-rata. Kebutuhan dasar manusia bukan hanya masalah secara material tetapi juga spiritual. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya spiritualitas yang dapat mengatasi masalah kemiskinan, tetapi juga masalah lain seperti kriminalitas akibat keterbatasan ekonomi.

Islam tampaknya telah dipengaruhi oleh nilai-nilai modern ini. Jadi sulitnya mengamalkan nilai ekonomi ilahiah sebagai doktrin teologis masyarakat Islam, khususnya pandangannya tentang kemiskinan. Ekonomi Islam mengingatkan kita kembali bahwa dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Secara komprehensif menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari ketimpangan.

⁴¹ Ibid, Ismail: 115.

b. Indikator Kemiskinan dalam Islam

Indikator kemiskinan akan mempermudah kalangan dalam menganalisa model-model penanggulangan kemiskinan, baik berupa langkah preventif maupun langkah perbaikan. Tokoh Ekonomi Islam memiliki cara dalam melihat kemiskinan seseorang. Dengan berdasarkan al-Quran dan hadits pemikir ekonomi Islam mengemukakan indikator-indikator kemiskinan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kebutuhan primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurut Taqiyuddin an-Nabani, diantara kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan.

2. Berdasarkan Kebutuhan Pokok Materi Spiritual

Dalam melihat kemiskinan menurut Irfan Syauqi Beik pada konsep *Maqashid Syariah*, ia membagi tiga kebutuhan pokok manusia yaitu bisa melaksanakan ibadah, terpenuhi sandang, pangan, dan papan, dan tidak adanya rasa takut.

3. Garis Batas Nishab

Batas nishab bagi ekonomi Islam adalah batas yang berperan dalam menentukan kaya atau miskinnya seseorang. Zakat merupakan acuan dalam skema Islam.

c. Solusi Problem Kemiskinan

Kemiskinan menjadi sumber utama problem sosial di tengah masyarakat. Keberadaannya menjadi penghalang hubungan baik manusia dengan Allah, memperburuk hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta

mengganggu konsentrasi pikiran. Islam, melalui pendekatan ekonominya memberikan jaminan dalam menekan angka kemiskinan. Solusi yang dapat dilakukan bagi sebuah negara adalah sebagai berikut:

1) Mengubah Paradigma Kemiskinan

Masyarakat telah terlanjur terlena serta terjebak dengan budaya keduniaan akhir-akhir ini. Pada negara yang mayoritas Islam mengalami kesulitan dalam mengatasi kemiskinan karena paradigma yang dibangun tidak sesuai dengan syariat masyarakat Islam. Ekonomi Islam menghendaki adanya keseimbangan antara kebutuhan harta dengan kebutuhan spiritual. Hal ini agar tercipta keadilan di tengah masyarakat.

2) Memaksimalkan Filantropi Islam

Pada prinsipnya tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya dalam Islam. Salah satu solusi kemiskinan dalam ekonomi Islam adalah dengan semangat berbagi kasih terhadap rizki atau yang disebut dengan filantropi. Filantropi merupakan suatu perbuatan seseorang dengan maksud terciptanya kemaslahatan sosial. Makna ini sangat dekat dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

3) Menyediakan Lapangan Pekerjaan dan Pemberdayaan

Pada prinsipnya masyarakat Islam dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal di muka bumi ini. Masyarakat yang produktif akan mendorong kemajuan ekonomi negara. Sektor-sektor ekonomi seperti industri,

perdagangan, dan usaha mikro juga dapat dibangun melalui masyarakat yang produktif. Dengan begitu, masyarakat tidak menjadi beban negara akan tetapi sebaliknya.

4. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan

Islam adalah ajaran Allah yang sangat diperlukan (menyatu) dan mencakup semua aspek kehidupan. Kehadiran ekonomi Islam telah mengakibatkan adanya harapan baru bagi semua orang, terutama bagi umat Islam karena menjadi ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sebagai arus perdebatan utama pada sistem ekonomi dunia.

Dalam hal ini aktivitas ekonomi diperlukan dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam dalam mengatasi permasalahan yang terjadi untuk mencari penyelesaian permasalahan atau solusi. Pada prinsip ekonomi Islam, pelaku ekonomi Islam berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar seperti prinsip ilahiyah dalam ekonomi Islam, kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.⁴²

Prinsip ekonomi Islam juga diperlukan dalam menyelesaikan persoalan tentang upah minimum, jumlah penduduk dan kemiskinan karena berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Dan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari segala bentuk aktivitas manusia. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam

⁴² Abu Bakar et al., "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL," *Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 2, Ok (2020): 232-249.

sangat penting karena mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan sesama manusia (hubungan horizontal) sama pentingnya hubungan dengan Allah (hubungan vertikal) dalam arti manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya berlandaskan keadilan sosial yang bersumber dari Alquran.⁴³

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara lain yaitu:

قُلْ ۖ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) لَمْ يَلِدْ ۖ وَ لَمْ يُولَدْ ۖ (۳) وَمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۖ (۴)

Artinya : *Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."* (Q.S. Al-Ikhlâs: 1-4)

Dalam berusaha atau bekerja, ayat di atas mengisyaratkan bahwa segala bentuk usaha manusia harus selalu bergantung kepada Allah SWT. Keyakinan atau pandangan hidup tersebut memunculkan aktivitas tanggung jawab ketuhanan yang menempatkan instrumen syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan dapat membentuk integritas yang membantu terbentuknya pemerintahan yang baik

Prinsip tauhid ini pada hakikatnya dalam ekonomi Islam adalah semua sumber daya atau kekayaan berasal dari Allah SWT, dan penggunaannya diatur atau ditentukan oleh Allah. Karena Allah menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam mekanisme ekonomi Islam Kata keadilan

⁴³ Ibid., Abu Bakar et al: 244.

berasal dari kata Arab /'adl yang secara harfiah berarti sama. Menurut kamus bahasa Indonesia, berarti tidak memihak.⁴⁴ Adil dalam ilmu ekonomi dapat diterapkan untuk menentukan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan efek yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-'adl, al-qisth, dan al-mizan.⁴⁵ Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam surah Ar-Rahman/55: 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ آلَ مِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي
 آلَ مِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا آلَ وَزِينَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 تُخْسِرُوا آلَ مِيزَانَ (٩)

Artinya: *“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”* (QS. Ar-Rahman: 7-9)

Penegakkan keadilan dan pembasmi bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al-Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan. Pada dasarnya prinsip keadilan dalam ekonomi Islam terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban.

Dalam hal ini manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya

⁴⁴ Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75–84.

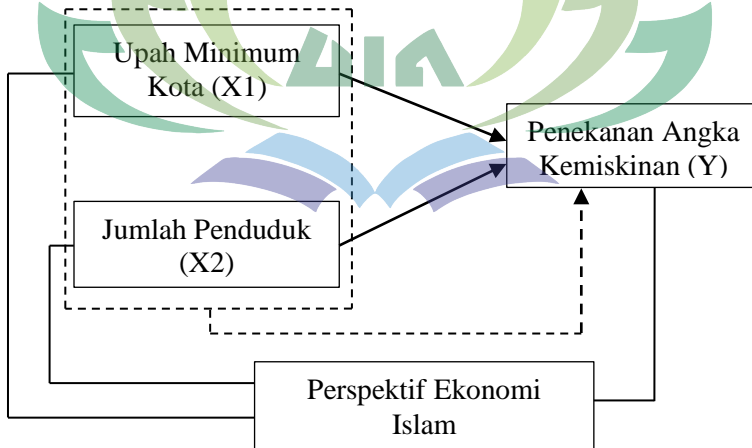
⁴⁵ Ibid. Mursal: 78 .

tanpa melaksanakan kewajiban sehingga akan mengarah pada pemerasan terhadap orang dan akan menyebabkan keadaan di dalam lingkungan tersebut menjadi keributan serta tidak terjalin keharmonisan.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir Kerangka berpikir merupakan seluruh kegiatan penelitian untuk menjelaskan alur dari penelitian ini yang dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian satu persatu. Orang yang berpikir ilmiah selalu menuntut adanya bukti empiris atau fakta yang mendukung. Dan sikap analitis ditunjukkan dengan suatu proses berpikir yang selalu mencari hubungan-hubungan dari fenomena yang diamati.⁴⁶

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Keterangan: —————> = Berpengaruh secara parsial
 - - - - -> = Berpengaruh secara simultan

⁴⁶ Iwan Hermawan, *Metodologi Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019): 29.

Pada gambar diatas dalam penelitian antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini hubungan antara variabel bebas yaitu Upah Minimum Kota (X1) dan Jumlah Penduduk (X2). Kemudian variabel terikat yaitu Penekanan Angka Kemiskinan (Y) Di Kota Bandar Lampung.

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau anggapan sementara. Dikatakan sebagai dugaan sementara, karena jawabannya hanya berdasarkan pada teori-teori yang signifikan saja, dan belum ada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Sehingga hipotesis dapat ditolak ketika salah dan hipotesis bisa diterima ketika terdapat fakta-fakta kebenarannya. Dimana hipotesis nol adalah tidak berpengaruh dan dilambangkan H_0 dan hipotesis alternatif adalah berpengaruh dan dilambangkan H_a .

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, dan setelah melakukan pengamatan tentang hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen maka terdapat beberapa hipotesis yang mendasari penelitian ini diantaranya:

a. Pengaruh upah minimum terhadap penekanan angka kemiskinan

Jika upah minimum mengalami kenaikan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun begitu juga sebaliknya sehingga penekanan kemiskinan terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurul Qomariah Muharomi (2022) dengan judul Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dugaan hipotesisnya adalah:

H_{01} : Variabel Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

H_{a1} : Variabel Upah Minimum berpengaruh terhadap

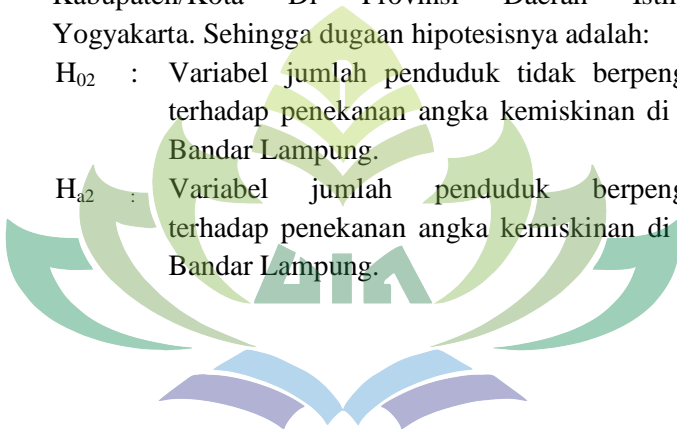
penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

b. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penekanan angka kemiskinan

Jika jumlah penduduk mengalami penurunan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun dan sebaliknya sehingga penekanan angka kemiskinan terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurul Qomariah Muharomi (2022) dengan judul Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dugaan hipotesisnya adalah:

H_{02} : Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

H_{a2} : Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.



DAFTAR RUJUKAN

- Agung, I Gusti, Ngurah Bagus, and Sis Hadiyati. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali." *Jurnal Manajemen Dan Sains* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.866>.
- Agustina, Rifka, and Dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar: Tohar Media, 2022.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al Quran Kemenag*. Jakarta, 2021.
- Anita, S Y. "Analisis Peran Gaya Kepemimpinan, Pelatihan Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022). <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/383%0Ahttps://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/383/299>.
- Asmuruf, Makdalena F Rumat, Vikie A, and George M. V. Kawung. "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatnasli Daerah (PAD) Di Kota Sorong." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 05 (2015).
- Azizah, Elda Wahyu, Sudarti Sudarti, and Hendra Kusuma. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2018).
- Bakar, Abu, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, Stis Al, and Ittihad Bima. "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL." *Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No.2, Ok (2020).
- Damanik, Rapika Kesatriani, and Selna Aprilia Sidauruk. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>.
- Darwin, Muhammad, and Dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

<https://doi.org/978-623-06290-56-9>.

- Desmawan, Deris. *Faktor Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Panel*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Didu, Saharuddin, and Ferri Fauzi. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak." *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>.
- Duli, Nikolaus. *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi Dan Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ferricha, Dian. *Hukum Ketenagakerjaan Di Era Digitalisasi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Fijra, Masayu Rosyidah dan Rafiq. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ghazali, Imam. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Gunawan, Moch Hoerul. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Tafkim* XVI (2020).
- Hartono, Nono. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2835>.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.

- Hermawati, dkk, Istiana. *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Ismail. “Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020).
- Izzaty, and Rafika Sari. “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2013).
- Jaharudin, Bambang Sutrisno dan. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Khomsan, Ali. *Indikator Kemiskinan Dan Miskasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Lavenia, Lulut, Syafri Mandai, Muhammad Yudhi Lutfi, Program Studi, Ekonomi Pembangunan, Upah Minimum, Jumlah Penduduk, and Angka Melek Huruf. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum , Pengangguran , Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023).
- Muhammad Ilyas Junjuran, Ajeng Tita Nawangsari. *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*. Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021.
- Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016.
- Nugraha, Billy. *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda Dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2022.
- Nur Azizah, Aulia, and Binti Nur Asiyah. “Pengaruh Jumlah

- Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Polidin, Miko. “MUNTAHIA BI-TAMLIK (IMBT) Miko Polindi.” *Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah Dan Al- 'Adalah, Dalam Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT)* 4988 (n.d.).
- Pratiwi, Zelin Dinda, and Dkk. *Ekonomi Dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Priyatno, Duwi. *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS Dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2022.
- Puspasari, Shinta, Mochamad Ridwan, and Satya Nurhakim. “Bargaining Dengan Mekanisme Penetapan Upah Minimum,” n.d.,.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi. *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia Press, 2022.
- Putri, Nuva Maresfin dan Eka Intan Kumala. *Ekonomi Lingkungan (Tinjauan Teoritis Dan Kajian Praktis)*. Bogor: IPB Perss, 2015.
- Rahman, Abdul. *Ekonomi Demografi Dan Kependudukan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023.
- Ritonga, Marito, and Tri Wulantika. “Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018).” *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3135>.
- Rizki, Maulana Prasetyo. “Tingkat Pengangguran Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021” 1, no. 55 (2015).

- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif/ Quantitative Researc Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Saifuddin, Ridwan, Mohammad Syafrizal, Zainal Mutaqim, Shinta Fitriana, and Junaidi. "Menggali Akar Kemiskinan: Melihat Dari Dekat Kemiskinan Di Provinsi Lampung," 2018.
- Sari, Yulia Adella. "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>.
- Simbolon, Sahat. *Buku Referensi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meninggalkan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 2022.
- Sinaga, Murbanto. *Mengungkap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kepulauan Nias*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2019.
- Solihin, Budi. "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)." *Al-Mujaddid Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Syafri, and Putri Aulia Febrianti. "Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kab/Kota Privinsi Banten." *Metrik Serial Humaniora Dan Sains* 2, no. 1 (2021).
- Tambunan, Toman Sony. *Glosarium Istilah Pemerintah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Telaubanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Tumangkeng, Rizky Yulita Sutikno Debby Ch. Rotinsulu Steeva Y.L. "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019).

Ulya, Husna Ni`matul. "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>.

Wahjusaputri, Sintha, and Anim Purwanto. *Statistika Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 2022.

Wita Utami, Tianovida Siregar. "Pengaruh Umr Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016." *Jurnal Pionir LPPM* 7, no. 1 (2021).

Yulistiyono, Agus, and Dkk. *Ekonomi Lanjutan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022.

Zulkifli. "Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan." *Journal Ecces* 3, no. 2 (2016). <http://103.55.216.56/index.php/ecc/article/view/2900>.

